

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dilakukan melalui dua analisis yang berbeda yaitu analisis deskriptif dan uji regresi dengan data panel selama periode 2010-2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menempati posisi ideal dalam mengelola PAD. Sementara disisi lain terdapat beberapa kabupaten/kota yang termasuk daerah yang relatif tertinggal dalam pengelolaan PAD. Daerah tersebut adalah Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok dan Kota Pariaman.
2. Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh adalah daerah yang maju namun tertekan dimana daerah tersebut memiliki nilai *share* PAD yang besar terhadap Total Pendapatan Daerah, namun sebaliknya pertumbuhan PAD-nya relatif kecil.
3. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan dan Pasaman Barat adalah daerah yang berpotensi untuk berkembang dimana pertumbuhan PAD-nya relatif besar meskipun *share* PAD terhadap TPD masih relatif kecil.
4. PDRB Perkapita dan Jumlah Pelanggan Listrik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota di Sumatera Barat pada  $\alpha = 0,05$ .
5. Transfer kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah tidak signifikan mempengaruhi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada  $\alpha = 0,05$ .
6. Dari keseluruhan variabel bebas, PDRB Perkapita yang memiliki pengaruh paling besar terhadap PAD hal tersebut terlihat pada slope koefisien regresi pada angka positif 1,674 persen.

## B. Saran

Berdasarkan studi literatur dan kesiimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu :

1. Belum adanya daerah yang berada di kuadran I selama periode 2010-2017 menandakan pentingnya bagi setiap daerah untuk terus mengupayakan konsistensi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mencapai daerah yang ideal.
2. Daerah pada kuadran II disarankan untuk memprioritaskan ekspansi potensi penerimaan PAD adapun potensi yang dimaksud adalah PDRB masing-masing kota dan kabupaten.
3. Daerah pada Kuadran III disarankan untuk memprioritaskan upaya dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan tingkat efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.
4. Daerah pada Kuadran IV perlu mendapatkan perlakuan khusus terkait pembenahan di berbagai aspek untuk mencapai kinerja PAD yang lebih baik.
5. Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai *effect multiplier* dari tumbuhnya investasi di daerah yang mendorong kesejahteraan masyarakat (PDRB Perkapita). Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas yaitu investasi sektor swasta.
6. Demi mendorong kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga dituntut untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan stimulasi dan proteksi kepada *infant industry* sehingga pada gilirannya akan mendorong perbaikan kinerja PAD.
7. Jumlah Pelanggan Listrik memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD, dengan demikian setiap daerah diharapkan terus mendukung kinerja PLN dalam upaya perluasan jaringan pelayanan kelistrikan sehingga dapat meningkatkan PAD baik secara langsung

melalui pajak penerangan jalan, maupun peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.

8. Meskipun transfer PBB-P2 ke daerah belum memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD, namun pemerintah kota maupun kabupaten perlu berbagai melakukan perbenahan dalam pengelolaannya sehingga penerimaan PAD dari PBB-P2 dapat lebih optimal. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pembenahan baik secara internal maupun eksternal.
9. Disisi internal peningkatan penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan melalui upaya peningkatan SDM, pembaharuan data base, sementara disisi eksternal pemerintah dapat melakukan berbagai penyuluhan maupun memberikan program yang mampu berdampak nyata pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembayaran PBB-P2.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer maupun menambah variabel yang akan membantu dalam penyempurnaan penelitian ini.